

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023

Dinas Perhubungan

Provinsi Sumatera Utara



Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jl. Iman Bonjol No.61

Nomor Telepon : 4510082-4510083

Website : www.dishub.sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LKjIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2023 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan, 29 Februari 2024

KERALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr. AGUSTINUS, S.SIT, MT
PEMBINA TINGKAT I /IVb
NIP.19760811 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran.....	9
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	9
1.4 Dasar Hukum.....	10
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	11
BAB II	13
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	13
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023	15
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III	20
3.1 Capaian Kinerja.....	20
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	21
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	24
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	25
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	26

3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	27
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	28
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	29
3.2	Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV		37
LAMPIRAN		38

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	8
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	14
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	16
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	18
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	19
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	22
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	24
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	27
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	29
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	31
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	7
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran

perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara :

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi, Sekretariat, Bidang Lalu Lintas Jalan, Bidang Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran, Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang angkutan jalan, meliputi pelaksanaan angkutan orang

- dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta penyelenggaraan terminal;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayaran, meliputi kepelabuhanan, pembinaan badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran serta pembinaan angkutan rakyat, sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian dan pengembangan, meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi, koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana perhubungan serta pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
 - f. penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
 - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - h.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas Perhubungan dibantu oleh:

- a. Sekretaris, terdiri dari :
 - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - 3. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
- b. Kepala Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - 2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
- c. Kepala Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
 - 2. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang
- d. Kepala Bidang Pelayaran, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Kepelabuhanan
 - 2. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran

e. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan :

1. Kepala Seksi Perkeretaapian
2. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sarana dan Prasarana (UPTD. PSP)

UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan, monitoring, pengendalian, pembinaan keselamatan dan pengawasan operasional penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlintasan sebidang kereta api, pelabuhan pengumpan regional, serta integrasi antara moda yang bersifat lintas kabupaten/kota yang menjadi urusan provinsi dan atau penugasan.

UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai dan penyeberangan, perlintasan sebidang kereta api pada jalan provinsi, pelabuhan pengumpan regional serta integrasi antar moda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan operasional sarana dan prasarana angkutan jalan, sungai dan penyeberangan, pelabuhan pengumpan regional serta integrasi antar moda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan pengadaan, pembangunan, pengawasan serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. penyelenggaraan bahan penyusunan program dan kegiatan di bidang pengawasan, pengendalian dan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta perencanaan kegiatan dan pembangunan di wilayah kerja UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- f. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sarana dan Prasarana (UPTD. PSP) Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. UPTD. PSP Wilayah I Binjai
- b. UPTD. PSP Wilayah II Kabanjahe
- c. UPTD. PSP Wilayah III Kisaran
- d. UPTD. PSP Wilayah IV Tarutung
- e. UPTD. PSP Wilayah V Padang Sidempuan
- f. UPTD. PSP Wilayah VI Gunung Sitoli

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana (UPTD. PSP Wilayah) dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Kepala Seksi Operasional Prasarana dan Sarana Perhubungan ;
- c. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Perhubungan.

2. Unit Pelaksana Teknis Daerah Angkutan Danau dan Penyeberangan (UPTD. ADP)

UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas penyelenggaraan pembinaan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Danau dan Penyeberangan serta pembinaan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Angkutan Danau dan Penyeberangan.

UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

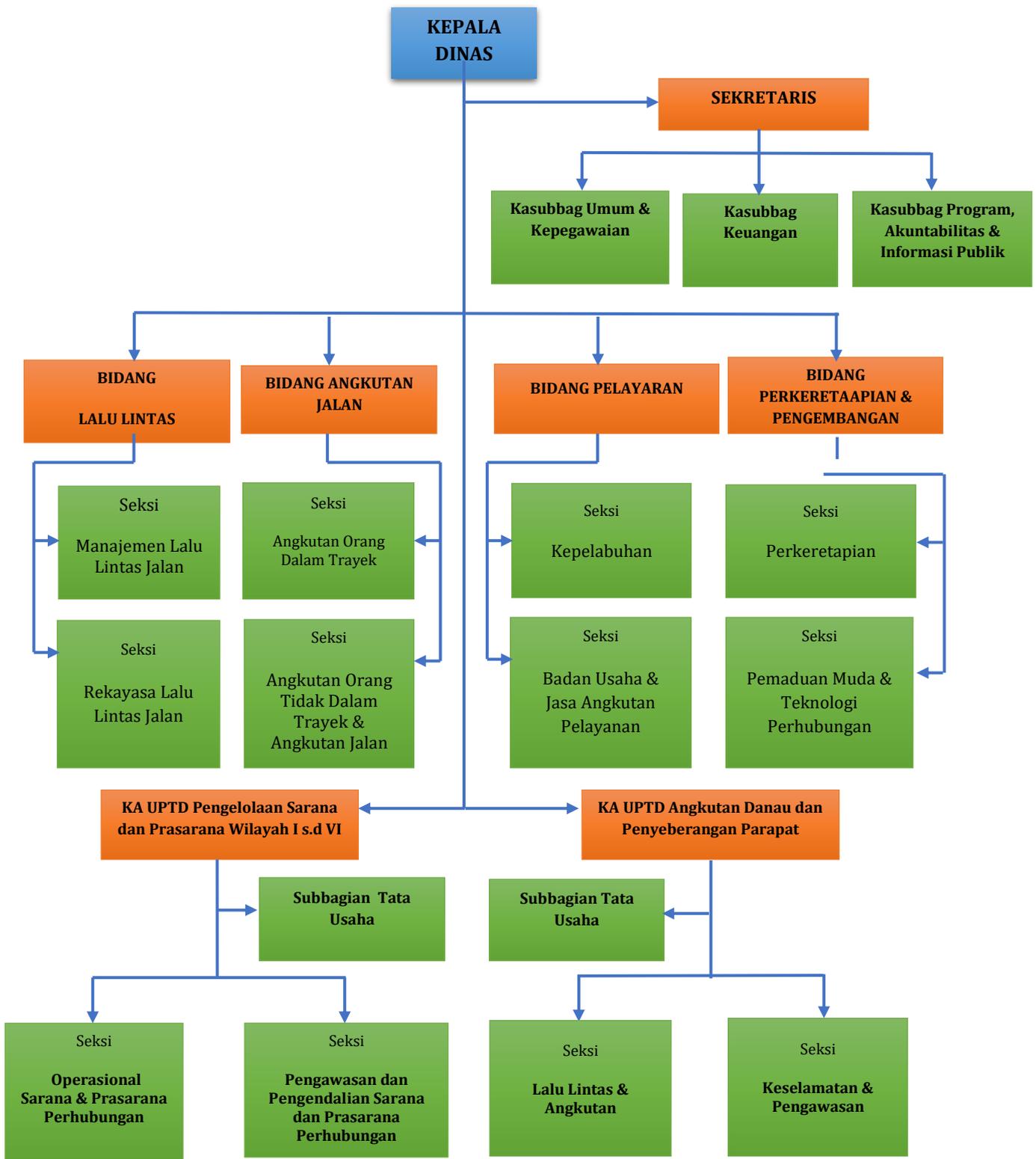
- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang Angkutan Danau dan Penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan Angkutan Danau dan Penyeberangan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, instansi vertikal dan kabupaten/kota sesuai Standar yang ditetapkan;
- c. penyelenggaraan fasilitas pelayanan Angkutan Danau dan Penyeberangan;
- d. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal;
- e. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas.
- f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Kepala UPTD. Angkutan Danau dan Penyeberangan dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan ;
- c. Seksi Keselamatan dan Pengawasan ;

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara



1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2022	Rp. 74.541.888.791
APBD	Tahun 2023	Rp. 91.035.017.997
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp. 0

Sumber : APBD tahun 2022 dan Tahun 2023.

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan Isu strategis yang dihadapi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Isu Staregis Transportasi Jalan

- a. Masih minimnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu, guardrail, delineator dan marka jalan. Kondisi ini berdampak terhadap minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan, khususnya di jalan provinsi di Sumatera Utara. Sementara itu keberadaan fasilitas keselamatan jalan ini sangat besar manfaatnya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Salah satu faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan.
- b. Tingkat kemacetan lalu lintas yang semakin tinggi, khususnya di wilayah perkotaan Mebidang.
- c. Seiring dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi, khususnya sepeda motor sementara kapasitas jalan cenderung statis, telah berdampak

terhadap kemacetan lalu lintas diwilayah perkotaan Mebidang. Tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang tinggi diwilayah tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat pelayanan angkutan umum masih rendah.

- d. Terminal sebagai simpul transportasi jalan belum berfungsi sebagaimana mestinya.
 - e. Terminal seyogyanya berfungsi sebagai tempat naik/turun penumpang dan untuk berpindah moda. Namun dalam operasionalnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, lebih dominan fungsi untuk pendapatan asli daerah dari retribusi terminal.
 - f. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara fasilitas keselamatan yang terpasang, hal tersebut terlihat dari tingkat kerusakan dan kehilangan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti daun rambu, guardrail dan deliniator di beberapa wilayah di Sumatera Utara yang masih cukup tinggi. Tingkat kemacetan lalu lintas yang tinggi, khususnya dikawasan perkotaan Mebidang
2. Isu Strategis Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
- a. Masih terbatasnya sarana angkutan danau dan penyeberangan yang tersedia, yang memenuhi persyaratan laik layar, khususnya kapal-kapal danau tradisional.
 - b. Masih kurangnya keterpaduan pembangunan jaringan transportasi SDP dengan rencana pengembangan wilayah.
 - c. Masih minimnya kelengkapan fasilitas keselamatan penumpang di kapal danau dan penyeberangan
 - d. Belum optimalnya peran serta swasta dalam penyelenggaraan ASDP, baik dalam investasi pembangunan, operasi dan pemeliharaan, berdampak pada beban subsidi pengoperasian yang harus ditanggung oleh

Pemerintah Provinsi, seperti pada angkutan penyeberangan lintas Muara – Nainggolan.

e. Masih minimnya Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

3. Isu Strategis Transportasi Perkeretaapian

- a. Belum optimalnya pengoperasian kereta api komuter sebagai sarana mobilitas penduduk diperkotaan Mebidang
- b. Masih banyaknya kondisi prasarana (rel, jembatan KA dan sistem persinyalan dan telekomunikasi KA) yang telah melampaui batas umur teknis, serta banyak terjadi *backlog* pemeliharaan prasarana.
- c. Semakin menurunnya kualitas sarana angkutan perkeretaapian karena sebagian besar telah melampaui umur teknis, serta kondisi perawatannya tidak terpenuhi, sehingga banyak sarana yang tidak siap operasi.
- d. Kecelakaan KA, terutama akibat *backlog* pemeliharaan, dan rendahnya disiplin pengguna jalan pada perlintasan sebidang.
- e. Masih rendahnya keamanan dan ketertiban (sterilisasi), serta banyaknya gangguan di stasiun dan sepanjang jalur jalan kereta api akibat banyak munculnya bangunan liar, kegiatan masyarakat di sepanjang jalur dan aktifitas pedagang asongan yang cukup meresahkan penumpang.
- f. Rendahnya mobilitas angkutan akibat belum optimalnya keterpaduan pelayanan antar-moda, kondisi prasarana dan sarana, terbatasnya pengembangan lintas jaringan pelayanan dan sumber daya perkeretaapian.
- g. Masih rendahnya kinerja pelayanan kereta api (produktivitas angkutan, ketepatan jadwal, kenyamanan). Juga masih rendahnya kualitas SDM perkeretaapian, terutama dalam budaya organisasi, manajemen dan penguasaan teknologi.

4. Isu Strategis Transportasi Laut

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 432 Tahun 2017 tentang Tataunan Kepelabuhan Nasional, Sumatera Utara memiliki 11 Pelabuhan Pengumpan Regional yang menjadi kewenangan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, namun hingga saat proses P3D belum selesai.
- b. Dukungan aksesibilitas jalan ke Pelabuhan pengumpan regional di Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan.
- c. Kondisi fasilitas di pelabuhan pengumpan regional masih sangat minim dan keterbatasan kapasitas.

5. Isu Strategis Transportasi Udara

- a. Dukungan aksesibilitas dan mobilitas dari penumpang ke Bandara, dan keterbatasan fasilitas di bandara
- b. Pengendalian tata guna lahan disekitar kawasan bandar udara
- c. Tidak adanya kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan penyelenggaraan angkutan udara sangat minim.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera pada tahun 2019 – 2023 adalah :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
- b. Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi

Tujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera pada tahun 2019 – 2023 adalah :

- a. Terwujudnya Konektivitas Nasional
- b. Meningkatnya Keselamatan Transportasi
- c. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.1Error! Bookmark not defined. **Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1. Meningkatkan Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	23,08%	30,77%			
2			Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Jalan	79,22%	79,65%			
3			Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan penyeberangan	73,81%	76,19%			
4	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	2. Meningkatkan Kualitas Infratraktur	Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	60,63%	70,24%			
5	Terwujudnya Konektivitas Nasional	3. Meningkatkan Konektivitas Wilayah	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan			38,46 %	46,15 %	53,85%
6	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	4. Meningkatkan Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan			53,65 %	67,14 %	78,12 %
7	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan	5. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan	On Time Performance Layanan Transportasi			83,520%	83,610 %	83,860 %

Sumber : Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2023 dan RPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	1 Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	%	Terbangunnya Terminal Penumpang Tipe B di Sumatera Utara	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B dibangun 2019-2023)/Jumlah Terminal Penumpang Tipe B Kewenangan Provsu x100%	Data Terminal Penumpang Tipe B di Sumatera Utara
		2 Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Jalan	%	Terlaksananya Izin Trayek Angkutan Jalan di Sumatera Utara	(Jumlah Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi / Total kebutuhan Trayek Angkutan Jalan di Provsu x 100%	Data Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Utara
		3 Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan	%	Terlaksananya Izin Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP) di kawasan Danau Toba	(Jumlah Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP) di Kawasan Danau Toba (KDT)/Total kebutuhan jaringan trayek angkutan Danau dan Penyeberangan di	Data Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP) di Kawasan Danau Toba (KDT)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
					Kawasan Danau Toba x 100%		
2	Meningkatnya Kualitas Infratraktur	1	Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	%	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Utara	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang/Total Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan 2019-2023 x 100%	Data Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1 Meningkatkan Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	1.Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	Terminal	4
			2. Persentase Konektivitas Jaringan Jangkutan Jalan	Izin Trayek Angkutan Jalan	368
			3.Persentase Konektivitas Jaringan Agkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	Izin Trayek Angkutan ADP	32
2	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	2 Meningkatkan Kualitas Infratraktur	4.Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	unit	44.178

Sumber : Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih

baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	30,76 %
		2. Persentase Konektivitas Jaringan Jangkutan Jalan	91,71 %
		3. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	92,50 %
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	4. Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	49,35 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

**Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Utara**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	30,76%
1.	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	91,71%
1.	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
2.	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	92,50%
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	49,35 %
1.	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
	- Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell		
	- Pengadaan dan Pemasangan Delineator		
	- Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan		
	- Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan		
	- Pengadaan dan Pemasangan ZoSS		
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
	- Pengadaan dan Pemasangan LPJU Solar Cell		
	- Pengadaan dan Pemasangan Delineator		

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Sumatera Utara Tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	13 Terminal	4 Terminal	30,77 %	Data Terminal Penumpang Tipe B di Sumatera Utara
		2. Persentase Konektivitas Jaringan angkutan Jalan	462 Trayek Angkutan	368 Trayek Angkutan	79,65%	Data Trayek Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Utara
		3. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	42 Trayek ADP	32 Trayek ADP	76,19%	Data Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP) di Kawasan Danau Toba (KDT)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	463.226 unit	44.178 unit	70,24 %	Data Faskes yang terpasang

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan

Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B dan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2023 adalah Pembangunan Terminal Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang. Capaian realisasi konektivitas simpul angkutan jalan pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan dengan total jumlah terminal yang telah dikelola sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya, perhitungan untuk capaian sampai tahun 2023 adalah jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang telah dikelola dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sumatera Utara sehingga hasil yang didapat adalah sebesar 30,77%.

2. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan

Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan adalah berupa Trayek Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Utara. Target sampai tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator ini adalah 368 (tiga ratus Enam Puluh delapan) trayek, Capaian konektivitas Jaringan Angkutan Jalan pada tahun 2023 adalah sebesar sebesar 79,65%. Adapun capaian 2 (dua) trayek

angkutan jalan yang tercapai di tahun 2023 yaitu Trayek Angkutan Jalan Langkat - Labuhan Batu Selatan dan Trayek Angkutan Jalan Binjai – Padang Sidempuan

3. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan

Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan di Sumatera Utara merupakan Trayek ADP di Kawasan Danau Toba. Target yang ditetapkan pada indikator pada tahun 2023 sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) trayek dan capaian Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP) sebesar 76,19%, Adapun capaian 1 (satu) trayek ADP dimaksud adalah Trayek ADP Silalahi – Aek Rangat

4. Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan

Pada tahun 2023 Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan berhasil melebihi target yaitu sebesar 70,24 % dari target yang direncanakan sebesar 49,35 %. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Rambu Lalu Lintas | : 3.748 unit (66,54%) |
| 2. Guardrail | : 1.000 m” (60,64%) |
| 3. Delineator | : 6.040 unit (74,23%) |
| 4. Paku Jalan | : 11.008 unit (103,31%) |
| 5. Marka Jalan | : 21.127 m” (58,77%) |
| 6. LPJU Solar Cell | : 1.255 unit (57,97%) |

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	2 Terminal	3 Terminal	13 Terminal	4 Terminal	30,77 %
		2. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Jalan	364 Trayek Angkutan Jalan	366 Trayek Angkutan Jalan	462 Trayek Angkutan Jalan	368 Trayek Angkutan Jalan	79,65%
		3. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	40 Trayek ADP	41 Trayek ADP	42 Trayek ADP	32 Trayek ADP	76,19%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	4. Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	37.339 Unit	37.638 Unit	463.226 Unit	44.178 Unit	70,24 %

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan

Adapun kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B yang telah dilaksanakan sampai tahun 2023 yaitu :

1. Pembangunan Terminal Kabanjahe Kab. Karo Tahun Anggaran 2020

2. Sewa Tanah Terminal Ikan Paus Kota Binjai Tahun Anggaran 2021
3. Rehabilitasi Terminal Pasar X (Sepuluh) Kab. Langkat Tahun Anggaran 2022
4. Pembangunan Terminal Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang Tahun Anggaran 2023

Sehingga, perhitungan untuk capaian sampai tahun 2023 adalah jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang telah dikelola dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sumatera Utara sehingga hasil yang didapat adalah sebesar 30,77%.

2. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan

Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan adalah berupa Trayek Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Utara. Target sampai tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator ini adalah 7 (tujuh) trayek dan capaian realisasi sampai tahun 2023 sebesar 79,65%.

Adapun capaian 7 (tujuh) trayek angkutan jalan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Trayek Angkutan Jalan Langkat – Tobasa Tahun Anggaran 2019
2. Trayek Angkutan Jalan Langkat – Samosir Tahun Anggaran 2019
3. Trayek Angkutan Jalan Tanjung Balai – Sergai Tahun Anggaran 2021
4. Trayek Angkutan Jalan Samosir – Labuhan Batu Selatan Tahun Anggaran 2021
5. Trayek Angkutan Jalan Labuhan Batu Selatan - Samosir Tahun Anggaran 2022
6. Trayek Angkutan Jalan Langkat - Labuhan Batu Selatan Tahun Anggaran 2023
7. Trayek Angkutan Jalan Binjai – Padang Sidempuan

3. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan

Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan di Sumatera Utara merupakan Trayek ADP di Kawasan Danau Toba. Target yang ditetapkan pada indikator ini sebanyak 4 (empat) trayek dan capaian realisasi pada tahun 2023 sebesar 76,19%.

Adapun capaian 4 (empat) trayek ADP dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Trayek ADP Tiga Raja – Porsea Tahun Anggaran 2019
2. Trayek ADP Tiga Ras – Ambarita Tahun Anggaran 2020
3. Trayek ADP Tongging - Silalahi Tahun Anggaran 2021
4. Trayek ADP Silalahi – Aek Rangat Tahun Anggaran 2022

4. Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan

Pada tahun 2023 Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan berhasil melebihi target yaitu sebesar 70,24 % dari target yang direncanakan sebesar 49,35 %. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Rambu Lalu Lintas | : 3.748 unit (66,54%) |
| 2. Guardrail | : 1.000 m” (60,64%) |
| 3. Delineator | : 6.040 unit (74,23%) |
| 4. Paku Jalan | : 11.008 unit (103,31%) |
| 5. Marka Jalan | : 21.127 m” (58,77%) |
| 6. LPJU Solar Cell | : 1.255 unit (57,97%) |

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan

strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	30,77 %	30,76 %	100 %
		2. Persentase Konektivitas Jaringan Jangkutan Jalan	79,65%	91,71 %	86,84 %
		3. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	76,19%	92,50 %	82,37 %
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	4. Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	70,24%	49,35 %	142,33 %

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel :

Terjadi perubahan Target Akhir pada tahun 2024-2026 dikarenakan target disesuaikan dengan target nasional Dimana Tingkat kemajuan tidak dapat dihitung terhadap Target Akhir rencana Stategis.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	13 Terminal	4 Terminal	30,77 %	100 %	
		2. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Jalan	462 Trayek Angkutan Jalan	368 Trayek Angkutan Jalan	79,65%	86,84 %	
		3. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	42 Trayek ADP	32 Ptayek ADP	76,19%	82,37 %	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	4. Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	463.226 Unit	44.178 Unit	70,24 %	142,33 %	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel :

1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan

Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B dan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang). Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sampai tahun 2023 adalah Pembangunan Terminal Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang.

Capaian realisasi konektivitas simpul angkutan jalan pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan total jumlah terminal yang telah dikelola sebanyak 4 (empat) buah. Selanjutnya, perhitungan untuk capaian sampai tahun 2023 adalah jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang telah dikelola dibandingkan dengan jumlah Terminal Penumpang Tipe B di Provinsi Sumatera Utara sehingga hasil yang didapat adalah sebesar 30,77%.

2. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan

Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan adalah berupa Trayek Angkutan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) di Provinsi Sumatera Utara. Target sampai tahun 2023 yang ditetapkan pada indikator ini adalah 2 (dua) trayek, Capaian konektivitas Jaringan Angkutan Jalan pada tahun 2023 adalah sebesar sebesar 79,65%. Adapun capaian 2 (dua) trayek angkutan jalan dimaksud adalah Trayek Angkutan Jalan Langkat - Labuhan Batu Selatan dan Trayek Angkutan Jalan Binjai – Padang Sidempuan.

3. Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan

Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan di Sumatera Utara merupakan Trayek ADP di Kawasan Danau Toba. Target yang ditetapkan pada indikator pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu)

trayek dan capaian Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyberangan (ADP) sebesar 76,19%, Adapun capaian 1 (satu) trayek ADP dimaksud adalah Trayek ADP Silalahi – Aek Rangat.

4. Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan

Pada tahun 2023 Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan berhasil melebihi target yaitu sebesar 70,24 % dari target yang direncanakan sebesar 49,35 %. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Rambu Lalu Lintas : 3.748 unit (66,54%)
2. Guardrail : 1.000 m” (60,64%)
3. Delineator : 6.040 unit (74,23%)
4. Paku Jalan : 11.008 unit (103,31%)
5. Marka Jalan : 21.127 m” (58,77%)
6. LPJU Solar Cell : 1.255 unit (57,97%)

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	71,66 %	62,20 %	86,80 %	16.178.630.323	16.099.807.960	99,51 %	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	49,35 %	70,24 %	142,33 %	29.165.355.840	28.739.188.819	98,54 %	
					45.343.986.163	44.838.996.779	98,89 %	

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel:

1. Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata

Yang merupakan Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis ini adalah Konektivitas Simpul Angkutan Jalan, Konektivitas Jaringan Angkutan Jalan (AKDP) dan Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP). Capaian rata – rata total indikator kinerja ini adalah sebesar 86,80% dengan capaian anggaran sebesar 99,51%.

2. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur

Kegiatan prioritas sasaran strategis ini adalah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi. Pada tahun 2023 Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan berhasil melebihi target yaitu sebesar 70,24 % dari target yang direncanakan sebesar 49,35 % dengan capaian anggaran sebesar 98,54 % .

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menujng / Tidak Menujng	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Destinasi dan Pengelolaan Sektor Pariwisata	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	30,77 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	30,77 %	Menujng	
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Terminal Penumpang Tipe B		
		Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	79,65 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	79,65%	Menujng	
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1 Trayek Angkutan Jalan		
				Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Trayek Angkutan Jalan		

			76,19 %	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	76,19%	Menunjang	
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		1 Trayek ADP Danau Toba	Menunjang	
	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	70,24 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	70,24%	Menunjang	
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan yaitu Rambu Lalu Lintas, Guardrail, Delineator, Paku Jalan, Marka Jalan, ZOSS dan LPJU	44.178 unit		

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel:

1. Terdapat 3 Program dan 5 Kegiatan Prioritas untuk mendukung capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Provsu
2. Terlaksananya 5 Kegiatan Prioritas ini dengan baik sehingga dapat mencapai target yang ditentukan.
3. Pada beberapa komponen di indikator kinerja ini capaian realisasi masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga penyediaan trayek angkutan jalan dan angkutan ADP masih belum memadai. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan adanya penambahan anggaran agar peningkatan trayek angkutan jalan dan angkutan danau penyeberangan bagi masyarakat dapat dicapai.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN			
1	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	13.130.278.200	13.124.674.700	99,96
2	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.747.405.810	1.733.726.500	99,22
3	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	494.338.137	489.020.440	98,92
4	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.517.617.630	1.483.070.609	97,72
5	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	28.048.370.210	27.641.773.710	98,55
II	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
1	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	405.976.176	366.730.820	90,33
	J u m l a h	45.343.986.163	44.838.996.779	98,89

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel:

Alokasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp 45.343.986.163 dengan realisasi Rp 44.838.996.779 (98,89%).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Perhubungan Provsu memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) sasaran strategis tercapai. Di dalam 2 (dua) sasaran strategis terdapat 4 (empat) indikator dengan 2 (dua) indikator tercapai dan 2 (dua) indikator tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan antara lain yaitu :
 - a. Dampak terjadinya *Pandemic Covid-19* yang mengharuskan Dinas Perhubungan untuk merefocussing dan melakukan penyesuaian antara pengeluaran dengan pendapatan sehingga berdampak terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provsu.

- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Provsu.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib berlalu lintas di jalan raya.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah anggaran di Dinas Perhubungan Provsu dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.
4. Melakukan sosialisasi keselamatan jalan kepada masyarakat sehingga meningkatnya kesadaran/disiplin pengguna jalan dalam berlalu lintas.
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Provsu kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Medan, 29 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr. AGUSTINUS, S.SIT, MT
PEMBINA TINGKAT I /IVb
NIP.19760811 199903 1 003

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. AGUSTINUS, S.SIT, MT
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

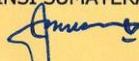
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,


Dr. AGUSTINUS, S.SIT, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760811 199903 1 003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	1. Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	100%
		2. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Jalan	100%
		3. Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	100%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	1. Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan	75,08%

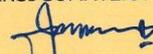
Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 200.000.000	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 32.345.600.319	APBD
4. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 516.574.176	APBD
TOTAL	Rp. 34.062.179.834	

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI

Medan, 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. AGUSTINUS, S.SiT, MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760811 199903 1 003

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dr. AGUSTINUS, S.SiT., MT
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : HASSANUDIN
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua,

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Pihak Kesatu,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. AGUSTINUS, S.SiT., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760811 199903 1 003

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

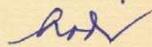
Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
Tahun : 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
1.	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	a	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	30,76 %
		b	Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Jalan	91,71 %
		c	Persentase Konektivitas Jaringan Angkutan Danau dan Penyeberangan (ADP)	92,50 %
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan		49,35 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 44.938.009.987	P. APBD
2. Pengelolaan Pelayanan	Rp. 405.976.176	P. APBD
TOTAL	Rp. 45.343.986.163	

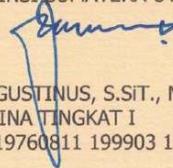
Medan, 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,



HASSANUDIN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Dr. AGUSTINUS, S.SIT., MT
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19760811 199903 1 003

Lampiran 3 Matriks Renstra 2019 – 2023 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD TAHUN 2021-2023	
		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.15.01	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.438.406.000		31.680.352.400		34.735.283.083		35.006.366.000		35.628.398.600			170.488.806.083
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	161.700.000	1 Tahun	680.445.000	1 Tahun	1.400.039.000	5 Tahun	2.330.645.700
2.15.01.1.01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	25.960.000.000	1 Tahun	25.960.000.000	1 Tahun	25.960.000.000	1 Tahun	25.960.000.000	1 Tahun	25.950.351.000	5 Tahun	129.790.351.000
2.15.01.1.02	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Tahun	650.729.000	1 Tahun	350.764.000	1 Tahun	400.616.000	1 Tahun	500.360.000	1 Tahun	687.634.000	5 Tahun	2.590.103.000
2.15.01.1.05	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	2.900.641.000	1 Tahun	2.600.192.000	1 Tahun	2.280.127.000	1 Tahun	2.275.381.000	1 Tahun	2.580.272.000	5 Tahun	12.636.613.000
2.15.01.1.06	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1.750.093.000	1 Tahun	1.054.200.000	1 Tahun	1.102.379.450	1 Tahun	1.573.155.000	1 Tahun	1.757.220.000	5 Tahun	7.237.047.450
2.15.01.1.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.312.649.000	1 Tahun	1.215.901.400	1 Tahun	4.491.998.933	1 Tahun	3.423.375.000	1 Tahun	2.605.261.600	5 Tahun	13.049.185.933
2.15.01.1.08	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	714.294.000	1 Tahun	399.295.000	1 Tahun	500.000.000	1 Tahun	593.650.000	1 Tahun	647.621.000	5 Tahun	2.854.860.000
2.15.01.1.09													
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		1.804.770.000		307.770.000		308.770.000		1.795.905.000		1.459.905.000		5.677.120.000
2.15.03.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi												
	Investasi Kegiatan di Pelabuhan Pengumpungan Regional	1 keg	2.635.000	1 keg	3.635.000	1 keg	4.635.000	1 keg	5.635.000	1 keg	6.635.000	5 keg	23.175.000
	Monitoring dan Supervisi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	1 keg	2.500.000	1 keg	2.500.000	1 keg	2.500.000	1 keg	2.635.000	1 keg	1.635.000	5 keg	11.770.000
	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Angkutan Laut di Provsu	1 keg	1.635.000	1 keg	1.635.000	1 keg	1.635.000	1 keg	1.635.000	1 keg	1.635.000	5 keg	8.175.000
	Sosialisasi Peraturan Bidang Pelayaran di Provsu	1 keg	150.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	150.000.000	1 keg	150.000.000	1 keg	150.000.000	5 keg	650.000.000
	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapa jaringan jalan kereta api jaringan kewenangan provinsi							1 keg	200.000.000			1 keg	200.000.000
	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian							1 keg	1.036.000.000			1 keg	1.036.000.000
	pengelolaan Perlintasan Sebidang perkeretaapian di Sumatera Utara							1 keg	250.000.000			1 keg	250.000.000
	Sosialisasi Perlintasan sebidang Kereta Api	1 keg	100.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000	5 keg	450.000.000
	DED Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api di Jalan									1 dok	100.000.000	1 keg	100.000.000
	Pembayaran Operasional Ferry ro ro di Danau toba	1 keg	998.000.000									1 keg	998.000.000
	FGD sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut danau dan penyeberangan di kewenangan provinsi Sumatera utara									1 keg	1.050.000.000	1 keg	1.050.000.000
	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringan lebih satu daerah kabupaten kota dalam satu daerah provinsi	1 keg	500.000.000									1 keg	500.000.000
	Sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapa jaringan jalan keretaapi jaringan kewenangan provinsi			1 keg	200.000.000							1 keg	200.000.000
	Sinkronisasi Tatralok Kabupaten Kota di Sumatera Utara	1 keg	50.000.000			1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	4 keg	200.000.000
2.15.03.1.01	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		550.976.000		450.800.000		3.200.500.000		5.400.750.000		650.976.000		10.254.002.000
2.15.03.1.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi												
	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi		500.976.000		450.800.000		650.500.000		600.750.000		600.976.000		2.804.002.000
	Sinkronisasi Tatralok Kabupaten Kota di Sumatera Utara	1 keg	50.000.000			1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	1 keg	50.000.000	4 keg	200.000.000
	Pengadaan Kapal Pengawas ADP di Danau Toba					1 unit	2.500.000.000	1 unit	4.500.000.000			2 keg	7.000.000.000
	Pengadaan Mesin Kapal dikawasan danau toba							1 keg	250.000.000			1 keg	250.000.000
2.15.02.1.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN		37.600.000.000		34.625.000.000		40.460.000.000		40.450.000.000		67.619.113.000		220.754.113.000
2.15.02.1.01	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Linta untuk jaringan jalan provinsi												
	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	800.000.000	1 tahun	1.500.000.000	1 tahun	1.700.000.000	1 tahun	2.350.405.000	5 keg	7.850.405.000
	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 tahun	600.000.000	1 tahun	600.000.000	1 tahun	600.000.000	1 tahun	600.000.000	1 tahun	500.338.000	5 keg	2.900.338.000
	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan provinsi						260.000.000			1 keg	1.000.000.000	1 keg	1.760.000.000
	Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provir	150 org	200.000.000			150 org	200.000.000	150 org	200.000.000	150 org	200.000.000	600 keg	800.000.000
	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (Kegiatan Penanganan Dampak Inflasi untuk Subsidi Angkutan									1 keg	500.632.000	1 keg	500.632.000
2.15.02.1.02	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jasa provinsi												0
	Penetapan kebijakan tata kelola andalin	1 keg	250.000.000			1 keg	250.000.000	1 keg	250.000.000	1 keg	250.000.000	4 keg	1.000.000.000
	Pengadaan Traffic cone dan Water Barrier	200 unit	100.000.000									200 unit	100.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Taman Berlalu Lintas	1 keg	100.000.000									1 keg	100.000.000
	Pengadaan Timbangan Portable	2 unit	450.000.000	1 unit	225.000.000	2 unit	450.000.000	2 unit	450.000.000	2 unit	450.000.000	9 keg	2.025.000.000
	Pengadaan Mobil Patwal	6 unit	4.500.000.000			2 unit	1.500.000.000	2 unit	1.500.000.000	2 unit	1.500.000.000	10 keg	7.500.000.000
	Rehab Pagor Kantor Dinas dan UPT	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	500.000.000	5 keg	3.000.000.000
	Pengadaan Genset di UPT terminal dan Kantor UPT	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	1 unit	500.000.000	2 unit	1.000.000.000	1 unit	500.000.000	6 unit	3.000.000.000
	Pembangunan dan renovasi Kantor Dinas dan UPT Dishubsu	2 unit	2.000.000.000	2 unit	2.000.000.000	2 unit	1.000.000.000	2 unit	2.000.000.000	2 unit	2.000.000.000	10 keg	9.000.000.000
	Pembangunan Terminal VIP Kualanamu di Deli Serdang			1 unit	17.800.000.000							1 keg	#VALUE!
2.15.02.1.02	Penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan di jalan provinsi												0
	Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan jalan di jalan Provinsi	#### unit	26.400.000.000	100 unit	10.000.000.000	##### unit	26.500.000.000	15350 unit	26.800.000.000	15930 unit	27.767.738.000	53830 keg	117.467.738.000
2.15.02.1.02	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1 keg	500.000.000			1 keg	500.000.000	1 keg	500.000.000	1 keg	500.000.000	4 keg	2.000.000.000
2.15.02.1.04	Pengelolaan terminal penumpang tipe B												0
	Pembangunan Terminal Kabanjahe Kab. Karo			1 terminal	20.000.000.000							1 terminal	20.000.000.000
	Rehabilitasi Terminal Pasar X (sepuhul) Langkat					1 terminal	4.000.000.000	1 terminal	2.000.000.000			2 terminal	6.000.000.000
	Pembangunan Terminal Lubuk Pakam Kab. Deli serdang									1 terminal	16.000.000.000	1 terminal	16.000.000.000
	Renovasi Terminal tipe b di Sumatera Utara							1 keg	1.500.000.000	1 keg	100.000.000	2 terminal	1.600.000.000
	sewa Terminal Ikan Paus Kota Binjai					1 keg	100.000.000					1 keg	100.000.000
	KIPP terminal pasar X dan terminal pasar Langkat							1 keg	200.000.000			1 keg	200.000.000
	Rehab atau pemeliharaan terminal kabanjahe Kabupaten Karo							1 keg	250.000.000			1 keg	250.000.000
	Pembangunan gedung terminal terminal tipe B Si Jambi Tanjung Balai									1 keg	15.000.000.000	1 terminal	15.000.000.000
	Jasa konsultan pembangunan terminal pasar X					1 keg	600.000.000					1 keg	600.000.000
	Pengadaan tanah 2 terminal					1 keg	2.000.000.000					1 keg	2.000.000.000
			73.394.152.000		67.063.922.400		78.704.553.083		82.653.021.000		105.358.392.600		407.174.041.083

Lampiran 4 LHE SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022

HASIL REVIU EVALUASI SAKIP PERANGKAT DAERAH PROVSU TAHUN ANGGARAN 2022
(DINAS PERHUBUNGAN PROVSU)

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja		
			2021	2022	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,45	28,50	Belum sampai 4 unit terpenuhi
2	Pengukuran Kinerja	30,00	8,44	30,00	
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,42	14,10	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	6,92	0,00	
Nilai Akuntabilitas Kinerja			51,23	72,60	
			CC	BB	

No	Catatan
1	Pada Tahun 2022, Evaluasi yang dilakukan terhadap 5 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilita Kinerja Internal dan capaian kinerja, sehingga telah dinilai sebesar 65,11 dengan katagori B (Baik), namun untuk perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 adalah 51,23 dengan katagori CC (Cukup).
2	Pada Tahun 2023, Evaluasi yang dilakukan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilita Kinerja Internal.
3	Dokumen yang kami peroleh dari Aplikasi E- SAKIP REVIU (ID :dishub.prov.sumut dan Pass :67D.45C) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yaitu: dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis (RESTRAS), dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, dokumen Laporan Kinerja (LK) Tahun 2022 serta dokumen yang terkait lainnya.
4	Hasil Evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 (nol) s.d 100 (seratus) dan selanjutnya diberikan kategori untuk menentukan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi
5	Pada Komponen Evaluasi Akuntabilitas Konejra Intern, Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagai APIP Daerah telah melaksanakan Evaluasi AKIP Intern Tahun 2022 dengan hasil Laporan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Bapak Inspektur per tanggal 24 Mei 2022, namun sampai berakhir pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Intern Tahun 2023 , hasil Evaluasi tersebut belum ditindak lanjuti
6	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara TA 2022 diperoleh nilai sebesar 72,60 Dengan kategori BB (Sangat Baik)

No	Rekomendasi
1	Terhadap permasalahan tersebut diatas kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 terhadap Akuntabilitas Kinerja agar menginstruksikan kepada staf serta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan sebagai berikut:
	a. Perbaikan pada Perencanaan Kinerja lebih ditingkatkan lagi pelaksanaannya
	b. Segera melaksanakan Tindak Lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provsu pertanggal 24 Mei 2022, agar dapat segera di tingkatkan kinerjanya.

HASIL EVALUASI SAKIP PADA 3 (TIGA) PERANGKAT DAERAH PROVSU TAHUN ANGGARAN 2022

SPT No 700/551/INSP/VI/2023 TANGGAL 16 JUNI 2023							
NO	PERANGKAT DAERAH PROVSU	Komponen/Sub Komponen/Kriteria		Komponen/Sub Komponen/Kriteria		NILAI TOTAL	KATEGORI
		PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA		
	NILAI BOBOT	30	30	15	25		
1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVSU	27,6	26,4	15	0	69	B (Baik)
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVSU	27,6	28,5	15	0	71,1	BB (Sangat Baik)
3	DINAS PERHUBUNGAN PROVSU	28,5	30	14,1	0	72,6	BB (Sangat Baik)

NO	JABATAN	NAMA TIM EVALUASI	TANDA TANGAN
1	KETUA	SALEH	
2	ANGGOTA	ADRINSYAH	
3	ANGGOTA	DIANA	
	PENGENDALI TEKNIS	EVA HAFNI	

No	Kategori/Sub-Kategori/Kriteria	Bobot	Unit/Uraian	Penilaian	% Penuhi	Jumlah	Absoransi	Pemerintah Daerah	Dokumen	Catatan
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00								
1.1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	AA	6	100,00%		6,00			
Kriteria										
1	Terdapat dokumen perencanaan kinerja									
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang									
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah									
4	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek									
5	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja									
6	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja									
1.2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu telah mengadopsi hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelesaian (problem) di tingkat level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	AA	9	100,00%		9,00			
Kriteria										
1	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan									
2	Rencana GPD									
3	Perjanjian Kinerja									
4	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu									
5	Rencana GPD									
6	Perjanjian Kinerja									
7	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kabukhuan atau Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai									
8	Kualitas Rumusan Hasil (Tujan/Hasil) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai									
9	Rencana									
10	Perjanjian Kinerja									
11	Ukuran Keberhasilan Indikator Kinerja telah memenuhi kriteria SMART									
12	Rencana									
13	Perjanjian Kinerja									

6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menginformasikan kondisi Kinerja Utama yang telah dicapai, tertuang secara berurutan (justrata) baik yang dipaparkan dalam 1 periode Perencanaan Strategis		AS/COE	A	1,00	Kriteria ini berlaku dengan semua IKU yang ditunjukkan telah mencapai kriteria IKU yang baik seperti: Smart, Digital, dan Inovatif dengan Kinerja Utama X2, atau Uji Karya, dan tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja (misal di SAP/SD dan PK)	IKU	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menginformasikan kondisi Kinerja Utama yang telah dicapai, tertuang secara berurutan (justrata) baik yang dipaparkan dalam 1 periode Perencanaan Strategis di dukung dengan bukti dokumen indikator Kinerja Utama (IKU) Data Perhubungan Probu.	100% (100%) 100% (100%)	
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievability), menantang, dan realistis									
	Renstra	a. apabila seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria b. apabila sebagian besar (>75-80%) target sesuai dengan kriteria c. apabila sebagian kecil (>50%-75%) target sesuai dengan kriteria d. apabila tidak ada (<50%) target sesuai dengan kriteria	AS/CO	A	1,00	Kriteria Target yang baik: - Menginformasikan kasus, tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) - Sesuai dengan RP/AM/Revisinya - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART. - Berdasarkan base data yang memadai - Berdasarkan asumsi dan kebutuhan yang baik	Renstra	Seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria di dukung dengan bukti dokumen Renstra Perencanaan 2022 Data Perhubungan Probu.	100% (100%) 100% (100%)	
	Pejajaran Kinerja	a. apabila seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria b. apabila sebagian besar (>75-80%) target sesuai dengan kriteria c. apabila sebagian kecil (>50%-75%) target sesuai dengan kriteria d. apabila tidak ada (<50%) target sesuai dengan kriteria	AS/CO	A	1,00	Kriteria Target yang baik: - Menginformasikan kasus, tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted) - Sesuai dengan RP/AM/Revisinya - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART. - Berdasarkan base data yang memadai - Berdasarkan asumsi dan kebutuhan yang baik	PK	Seluruh (100%) target sesuai dengan kriteria di dukung dengan bukti dokumen dalam Pejajaran Kinerja Eselon I dan dalam pejabat struktural	100% (100%) 100% (100%)	
8	Struktur Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta antara Kinerja Kondisional yang akan dicapai di setiap level jabatan (Casading)	a. apabila pohon kinerja telah menguraikan pohon kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan telah dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi b. apabila pohon kinerja telah menguraikan pohon kinerja instansi dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja namun belum dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi c. apabila pohon kinerja belum menguraikan pohon kinerja instansi dan belum memenuhi prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja d. Belum menyusun pohon kinerja	AS/CO	A	1,00	Prinsip Logis, Empiris, dan Masial	Pohon Kinerja Pejajaran Kinerja SDP	Dokumen Perencanaan Kinerja telah 100% menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta antara Kinerja Kondisional yang akan dicapai di setiap level jabatan (Casading)	100% (100%) 100% (100%)	
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/tingkat tugas dan fungsi (mis yang berkaitan (Crosscutting))	a. apabila pohon kinerja telah mengidentifikasi kinerja crosscutting dan di implementasikan sebagai panduan dalam perencanaan kinerja b. apabila pohon kinerja telah mengidentifikasi kinerja crosscutting dan rencana namun belum dimanfaatkan sebagai panduan dalam perencanaan kinerja c. Belum ada crosscutting	AS/CO	A	1,00	Crosscutting pada level: - Strategi, berupa hasil (result) - Indikator, berupa efektivitas/hasil dari sebuah program/operasional, berupa penyelesaian dari suatu kegiatan/aktivitas	Pohon Kinerja	Perencanaan kinerja telah memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/tingkat tugas dan fungsi lain yang berkaitan	100% (100%) 100% (100%)	
10	Struktur Dokumen yang menunjukkan hierarki Perencanaan Kinerja									
11	Struktur pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	a. apabila seluruh (100%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang relevan dengan kriteria instansi b. apabila sebagian besar (>75-80%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang relevan dengan kriteria instansi c. apabila sebagian kecil (50-75%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang relevan dengan kriteria instansi d. apabila tidak ada (<50%) pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang relevan dengan kriteria instansi	AS/CO	A	1,00	Perencanaan kinerja pegawai: - PK atau SDP - memiliki hubungan keefektifitas/hasilnya dengan kriteria yang ditunjukkan/terjadi - target kinerja berdasarkan dari level atas	SDP	pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja	100% (100%) 100% (100%)	
12	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	A	13,5	80,5%	13,59				
Kinerja										
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai	a. apabila seluruh (100%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai b. apabila sebagian besar (>75-80%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai c. apabila sebagian kecil (50-75%) anggaran telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai d. apabila tidak ada (<50%) anggaran yang mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	AS/CO	A	1,00	Program, kegiatan dan besaran anggaran dengan kriteria sbb: - Melayak pemenuh anggaran yang dipaparkan secara: - Relevan - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan - besaran anggaran sesuai dengan prioritas	1. Renstra 2. RKT 3. DPA	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang telah tertera dengan baik di dokumen Renstra 2022 dan DPA Perubahan 2022	100% (100%) 100% (100%)	
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai	a. apabila seluruh (100%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai b. apabila sebagian besar (>75-80%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai c. apabila sebagian kecil (50-75%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai d. apabila tidak ada (<50%) aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai	AS/CO	A	1,00	Program, kegiatan dan besaran anggaran dengan kriteria sbb: - Melayak pemenuh anggaran yang dipaparkan secara: - Relevan - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan - besaran anggaran sesuai dengan prioritas	1. Renstra 2. RKT 3. DPA	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang tertera dengan baik di dokumen Renstra 2022 dan DPA Perubahan 2022	100% (100%) 100% (100%)	
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track									
	Renstra	a. apabila seluruh (100%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track b. apabila sebagian besar (>75-80%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track c. apabila sebagian kecil (50-75%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track d. apabila tidak ada (<50%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track	AS/CO	A	1,00	Kriteria Target yang baik: - Berdasarkan base data yang memadai - Sesuai dengan kondite/kebutuhan	Renstra	Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik dengan bukti pendukung Renstra Perubahan 2022	100% (100%) 100% (100%)	
	Pejajaran Kinerja	a. apabila seluruh (100%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track b. apabila sebagian besar (>75-80%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track c. apabila sebagian kecil (50-75%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track d. apabila tidak ada (<50%) target kinerja tercapai dengan baik/on the right track	AS/CO	A	1,00	Kriteria Target yang baik: - Berdasarkan base data yang memadai - Sesuai dengan kondite/kebutuhan	Renstra	Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik dengan bukti pendukung Renstra Perubahan 2022 dan Pejajaran Kinerja	100% (100%) 100% (100%)	

2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyusunan (berimbangan/pengurangan) anggaran kinerja/biaya?	a. apabila Pengukuran Kinerja (40%) telah menjadi dasar dalam penyusunan (berimbangan/pengurangan) anggaran kinerja/biaya; b. apabila Pengukuran Kinerja (5-40%) telah menjadi dasar dalam penyusunan (berimbangan/pengurangan) anggaran kinerja/biaya; c. apabila Pengukuran Kinerja (15%) telah menjadi dasar dalam penyusunan (berimbangan/pengurangan) anggaran kinerja/biaya; d. apabila Pengukuran Kinerja belum menjadi dasar dalam penyusunan (berimbangan/pengurangan) anggaran kinerja/biaya.	AB/CO	A	1,00	Kriteria pemetaan tunggah kinerja pegawai yang berbeda dengan yang tidak kinerja tidak ada kinerjanya) pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target (pegawai yang sesuai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak kinerja) pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar	1. peraturan yang mengitung pemberian tunjangan dengan capaian kinerja.	Pengukuran Kinerja (40%) telah menjadi dasar dalam penyusunan (berimbangan/pengurangan) anggaran kinerja/biaya dengan bukti pendukung Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemetaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil	100.00% 100.00% 100.00%					
3	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penetapan/penghasilan jabatan dan kenaikan masa pengisian?	Tidak menjadi pertimbangan penilaian				Kriteria pemetaan hasil pencapaian jabatan (kenaikan masa pengisian) yang tidak sesuai (tidak menjadi pertimbangan masa jabatan pada masa jabatan)								
4	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Revisi) Anggaran?	Tidak menjadi pertimbangan penilaian				Kriteria pencapaian (pembayaran) target hasil (revisi) anggaran (pembayaran) kinerja tidak sesuai dengan (tidak menjadi pertimbangan)								
5	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan Strategi dalam mencapai kinerja?	Ya. Apabila pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan strategi dalam mencapai kinerja	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Monev Pengukuran Kinerja 3. Rencana Aksi	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan (Revisi) Anggaran dengan bukti pendukung Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemetaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil	100.00% 100.00% 100.00%					
6	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja?	Ya. Apabila pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan kebijakan dalam mencapai (berimbangan/pengurangan) kinerja masih sesuai dengan kebijakan	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Monev Pengukuran Kinerja 3. Rencana Aksi	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Kebijakan dalam mencapai kinerja telah didukung dengan bukti dokumen Perjanjian Kinerja, laporan Monev Pengukuran Kinerja dan Rencana Aksi	100.00% 100.00% 100.00%					
7	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan Atribut dalam mencapai kinerja?	Ya. Apabila pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan atribut dalam mencapai kinerja/ pengukuran kinerja masih sesuai dengan atribut	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Monev Pengukuran Kinerja 3. Rencana Aksi	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Atribut dalam mencapai kinerja telah didukung dengan bukti dokumen Perjanjian Kinerja, laporan Monev Pengukuran Kinerja dan Rencana Aksi	100.00% 100.00% 100.00%					
8	Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja?	Ya. Apabila pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyusunan anggaran dalam mencapai kinerja/ pengukuran kinerja masih sesuai dengan anggaran	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Monev Pengukuran Kinerja 3. Rencana Aksi	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyusunan Anggaran dalam mencapai kinerja telah didukung dengan bukti dokumen Perjanjian Kinerja, laporan Monev Pengukuran Kinerja dan Rencana Aksi	100.00% 100.00% 100.00%					
9	Terdapat efisiensi atau pengurangan anggaran dalam mencapai kinerja?	a. efisiensi terdapat di setiap dan perbaikan kegiatan/aktivitas yang tidak berdampak terhadap kinerja (output/hasil) b. Jika besaran efisiensi di dapat dari pengurangan biaya atau biaya yang tidak terkait terhadap output kegiatan c. tidak terdapat proses identifikasi aktivitas/kegiatan yang tidak terkait terhadap kinerja, namun belum dilaksanakan d. jika tidak ada unsur efisiensi	AB/CO	A	1,00	sudah jelas	1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Monev Pengukuran Kinerja 3. Rencana Aksi	Terdapat efisiensi atau pengurangan anggaran dalam mencapai kinerja didukung dengan bukti dokumen Perjanjian Kinerja, laporan Monev Pengukuran Kinerja Rencana Aksi dan DPA Dinas Perhubungan Provinsi	100.00% 100.00% 100.00%					
10	Kinerja pelaksanaan kerja memenuhi dan pedul atas hasil pengukuran kinerja	Tidak menjadi pertimbangan penilaian (tidak dikoreksi di nilai)												
11	Seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	a. apabila seluruh (100%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja b. apabila sebagian besar (>75%-99%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja c. apabila sebagian kecil (<75%-79%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja d. apabila tidak ada (<50%) pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	AB/CO	A	1,00	Kriteria pemahaman hasil pengukuran kinerja (tidak ada pemetaan kuantitatif/berbasis data kinerja organisasi/hasil data/nya) pengukuran kinerja sama atas data terapan (pengukuran kinerja sesuai tepat waktu)		Seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja didukung dengan bukti dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II, dan daftar pejabat struktural	100.00% 100.00% 100.00%					
3 PELAPORAN KINERJA														
3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja		15,00	AA	1A,1										
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun	3,00	AA	3	100,00%	3,00	Ya, jika laporan kinerja disusun	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah disusun	100.00% 100.00% 100.00%
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala						a. apabila laporan kinerja dilakukan per triwulan (3 Bulan) b. apabila laporan kinerja dilakukan per semester (6 Bulan) c. apabila laporan kinerja dilakukan 1 tahun sekali d. tidak dilakukan pelaporan kinerja	AB/CO	A	1,00	sudah jelas	1. Laporan Kinerja 2. Laporan Monev Kinerja di Aplikasi Kari3i	Laporan kinerja telah dilakukan per triwulan (3 Bulan) dengan bukti dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Monev Kinerja di Aplikasi Kari3i	100.00% 100.00% 100.00%
3	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.						Ya, jika laporan telah direvisi (terdapat surat keterangan revisi)	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi	100.00% 100.00% 100.00%
4	Dokumen Laporan Kinerja telah duplikasi/akan						a. apabila laporan kinerja duplikasi/akan secara luas (tidak dalam masyarakat) b. apabila laporan kinerja duplikasi/akan secara terbatas (internal pemerintah) c. apabila laporan kinerja belum duplikasi/akan	AB/CO	A	1,00	sudah jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja telah duplikasi/akan dalam Website Dinas Perhubungan Provinsi	100.00% 100.00% 100.00%
5	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.						Ya, jika laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu, per tanggal 3 Januari 2022	100.00% 100.00% 100.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atau Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/kegiatan kinerja serta upaya perbaikan/pemertumbuhan	4,50	BB	3,6	87,50%	3,94								
1	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan						Ya, jika laporan kinerja telah diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00	sudah jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah diformalkan	100.00% 100.00% 100.00%
2	Dokumen Laporan Kinerja (hasil) secara berkala/keluar dengan standar						Tidak menjadi pertimbangan penilaian							

3	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi pencapaian kinerja B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi pencapaian kinerja C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi pencapaian kinerja D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi pencapaian kinerja	AS/CO	A	1,00	Apabila informasi tentang pencapaian kinerja pencapaian kinerja harus berorientasi outcome - bahwa pencapaian kinerja yang ditunjukkan pada PKI.	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah dibuat secara berkala sesuai dengan standar	100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja sesuai dengan target tahunan	AS/CO	A	1,00	tidak jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	AS/CO	A	1,00	tidak jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah	100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya	AS/CO	A	1,00	tidak jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya	100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional	AS/CO	A	1,00	tidak jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja)	100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atau capaian kinerja beserta upaya nyata dan hasil yang terdapatnya.	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja	AS/CO	B	0,87	tidak jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah menginformasikan kualitas atau capaian kinerja beserta upaya nyata dan hasil yang terdapatnya	100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efikasi atau penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait efisiensi yang memperlengkapi efektivitas dengan capaian kinerja B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait efisiensi yang memperlengkapi efektivitas dengan capaian kinerja C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi terkait efisiensi yang memperlengkapi efektivitas dengan capaian kinerja D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi terkait efisiensi yang memperlengkapi efektivitas dengan capaian kinerja	AS/CO	B	0,87	tidak jelas	1. Laporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi telah menginformasikan efisiensi atau penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	A. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh (100%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan B. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian besar (>75-99%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan C. apabila laporan kinerja telah mengungkapkan sebagian kecil (50-75%) informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan D. apabila laporan kinerja belum (<50%) mengungkapkan informasi terkait upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan	AS/CO	B	0,87	tidak jelas	1. Laporan Kinerja Bisa dilihat dari perbaikan target atau asapun yang mengarah ke arah perbaikan kinerja.		100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
3.0	Palaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian etah/kegiatan dalam mencapai kinerja budidaya				100,00%				
1	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (Berbagai Jawa).	A. apabila seluruh informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan B. apabila sebagian informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan C. apabila informasi dalam laporan kinerja tidak menjadi perhatian utama pimpinan	AS/CO	A	1,00	Apabila informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian pimpinan - apabila dampak perbaikan pada perencanaan dan kegiatan dan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program secara keseluruhan - apabila dampak perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya	1. Laporan Kinerja 2. Mekanisme yang menginformasikan keterlibatan pimpinan	Palaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelesaian etah/kegiatan dalam mencapai kinerja budidaya dan telah menjadi perhatian utama pimpinan dibidang dengan baik dokumen kuisar tepat dengan pimpinan	100.000000 100.000000 100.000000

2	Informasi mengenai dalam laporan kinerja menjadi esensial seluruh pagawa.	<p>a. apabila lebih dari 80% pagawa perlu mendapat informasi dalam laporan kinerja.</p> <p>b. apabila 80% pagawa perlu mendapat informasi dalam laporan kinerja > 80%.</p> <p>c. apabila 40% pagawa perlu mendapat informasi dalam laporan kinerja > 80%.</p> <p>d. apabila 20% pagawa perlu mendapat informasi dalam laporan kinerja > 80%.</p> <p>e. apabila pagawa perlu mendapat informasi dalam laporan kinerja > 80%.</p>	AWG/GE	A	1,00	sudah jalan		Penyaji informasi dalam laporan kinerja menjadi esensial seluruh pagawa dapat ditunjukkan dengan Daftar Arahan Langkah-langkah Pemetaan Penghasilan Pegawai Diars Pabrik/Pabrikasi Produk	100% (100%) 100% (100%)
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian aktivitas untuk mencapai kinerja.	<p>a. apabila seluruh informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p> <p>b. apabila sebagian informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p> <p>c. apabila informasi dalam laporan kinerja berkala tidak digunakan dalam penyelesaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p>	AWG	A	1,00	sudah jalan	1. laporan Kinerja 2. RPPD tahun depan/2 tahun depan 3. CPA	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian aktivitas untuk mencapai kinerja telah ditunjukkan dengan Laporan Kinerja Rencana Kerja Pemertua Daerah (RPPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	100% (100%) 100% (100%)
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	<p>a. apabila seluruh informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.</p> <p>b. apabila sebagian informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.</p> <p>c. apabila informasi dalam laporan kinerja berkala tidak digunakan dalam penyelesaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.</p>	AWG	A	1,00	sudah jalan	1. laporan Kinerja 2. RPPD tahun depan/2 tahun depan 3. CPA	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyelesaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja telah ditunjukkan dengan Laporan Kinerja Rencana Kerja Pemertua Daerah (RPPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	100% (100%) 100% (100%)
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.	<p>a. apabila seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.</p> <p>b. apabila sebagian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.</p> <p>c. apabila informasi dalam laporan kinerja tidak digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.</p>	AWG	A	1,00	sudah jalan	1. laporan Kinerja 2. RPPD tahun depan/2 tahun depan 3. CPA	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja telah ditunjukkan dengan Laporan Kinerja Rencana Kerja Pemertua Daerah (RPPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	100% (100%) 100% (100%)
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan diadopsi berikutnya.	<p>a. apabila seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan diadopsi berikutnya.</p> <p>b. apabila sebagian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan diadopsi berikutnya.</p> <p>c. apabila informasi dalam laporan kinerja tidak digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan diadopsi berikutnya.</p>	AWG	A	1,00	sudah jalan	1. laporan Kinerja 2. RPPD tahun depan/2 tahun depan 3. CPA	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan diadopsi berikutnya telah ditunjukkan dengan Laporan Kinerja Rencana Kerja Pemertua Daerah (RPPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	100% (100%) 100% (100%)
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	<p>a. apabila seluruh informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</p> <p>b. apabila sebagian informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</p> <p>c. apabila informasi dalam laporan kinerja tidak mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.</p>	AWG	A	1,00	sudah jalan	1. laporan Kinerja 2. RPPD tahun depan/2 tahun depan 3. CPA	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi telah ditunjukkan dengan Laporan Kinerja Rencana Kerja Pemertua Daerah (RPPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).	100% (100%) 100% (100%)
4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL									
<p>4.1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</p> <p>4.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.3. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.7. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.8. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.9. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p> <p>4.10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkala</p>									
1	Sebuah rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diterbitkan	<p>a. jika seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diterbitkan.</p> <p>b. jika sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diterbitkan.</p> <p>c. jika sebagian kecil rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah diterbitkan.</p> <p>d. jika tidak ada rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diterbitkan.</p>	AWG/GE	D	0,00	0,00%	LUE dan Inspektorat Maha Indonegara	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Diars Pabrikasi Produk yang diterbitkan oleh AP/1 Daerah dalam hal ini Inspektorat Proses per tanggal 23 Mei 2022 belum diterbitkan	100% (100%) 100% (100%)
2	Sebuah laporan perubahan dan pengujian kinerja (Output) dengan memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	<p>a. jika seluruh indikator kinerja mengalami perubahan signifikan.</p> <p>b. jika sebagian besar indikator kinerja mengalami perubahan signifikan.</p> <p>c. jika sebagian kecil indikator kinerja mengalami perubahan signifikan.</p> <p>d. jika tidak ada indikator kinerja yang mengalami perubahan signifikan.</p>	AWG/GE	D	0,00	0,00%	Laporan Kinerja dan LUE dan Inspektorat Maha Indonegara	Perubahan dan pengujian kinerja (Output) Diars Pabrikasi Produk dengan memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dapat dilihat karena sebagian besar belum dilaksanakan Monitoring Berhingga Evaluasi SAMIP TAHUN 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Proses	100% (100%) 100% (100%)

Lampiran 5.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019 - 2023

NO	Indikator Kinerja	TARGET TOTAL CAPAIAN JANGKA PANJANG	EKSIKTING TAHUN (2014-2018)	TARGET CAPAIAN SAMPAI 2023		CAPAIAN TARGET																TOTAL CAPAIAN SAMPAI TAHUN 2023							
						2019				2020				2021				2022								2023			
						Jumlah	Jumlah	Satuan	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Persentase Capaian Tahun 2019 (%)	Total Capaian Sampai 2019 (%)	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Persentase Capaian Tahun 2020 (%)	Total Capaian Sampai 2020 (%)	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Persentase Capaian Tahun 2021 (%)	Total Capaian Sampai 2021 (%)	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022 (%)	Total Capaian Sampai 2022 (%)	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Persentase Capaian Tahun 2023 (%)	Total Capaian Sampai 2023 (%)	Jumlah
1	Persentase Konektivitas Simpul Angkutan Jalan	13	-	4	terminal	0	0	0	0	1	1	100,00	7,69%	0	1	100	15,38%	1	1	100	23,08%	2	1	1	30,77%	4	terminal	100%	4
2	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Jalan	462	361	7	trayek angkutan	2	2	100,00	78,57%	0	0	0,00	78,57%	2	2	100	79,00%	1	1	100	79,22%	2	2	100	79,65%	7	trayek angkutan	100%	368
3	Persentase Konektivitas Jaringan Trayek Angkutan Danau dan Penyeberangan	42	28	4	trayek adp	1	1	100,00	69,05%	0	0	0	69,05%	1	1	100	71,43%	1	1	100	73,81%	1	1	100	76,19%	4	trayek adp	100%	32
	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan								47,47%				47,47%				50,96%				60,63%				70,24%			70,24%	
	Rambu Lalu Lintas	13.150	5.002	4150	unit	2050	490	23,90	41,76%	0	0	0	41,76%	100	100	100,00	42,52%	1100	3158	287,09	66,54%	900	0	0,00	66,54%	3.748	unit	66,54%	8.750
	Guadrail	7.685	3.660	6555	m'	2725	0	0,00	47,63%	0	0	0	47,63%	830	820	98,80	58,30%	2320	80	3,45	59,34%	680	100	14,71	60,64%	1.000	m'	60,64%	4.660
	Delineator	26.809	13.859	7305	unit	3305	1298	39,27	56,54%	0	0	0	56,54%	0	0	0,00	56,54%	2000	2782	139,10	66,91%	2000	1960	98,00	74,23%	6.040	unit	74,23%	19.899
	Paku Jalan	32.119	22.174	8065	unit	4065	1980	48,71	75,20%	0	0	0	75,20%	0	0	0,00	75,20%	2000	0	0,00	75,20%	2000	9028	451,40	103,31%	11.008	unit	103,31%	33.182
	Marka Jalan	381.160	202.883	63713	m'	43713	17800	40,72	57,90%	0	0	0	57,90%	0	0	0,00	57,90%	10000	0	0,00	57,90%	10000	3327	33,27	58,77%	21.127	m'	58,77%	224.010
	LPIU	2.303	80	982	unit	63	54	85,71	5,82%	0	0	0	5,82%	219	219	100,00	15,33%	350	520	148,57	37,91%	350	462	132,00	52,92%	1.255	unit	57,97%	1.335